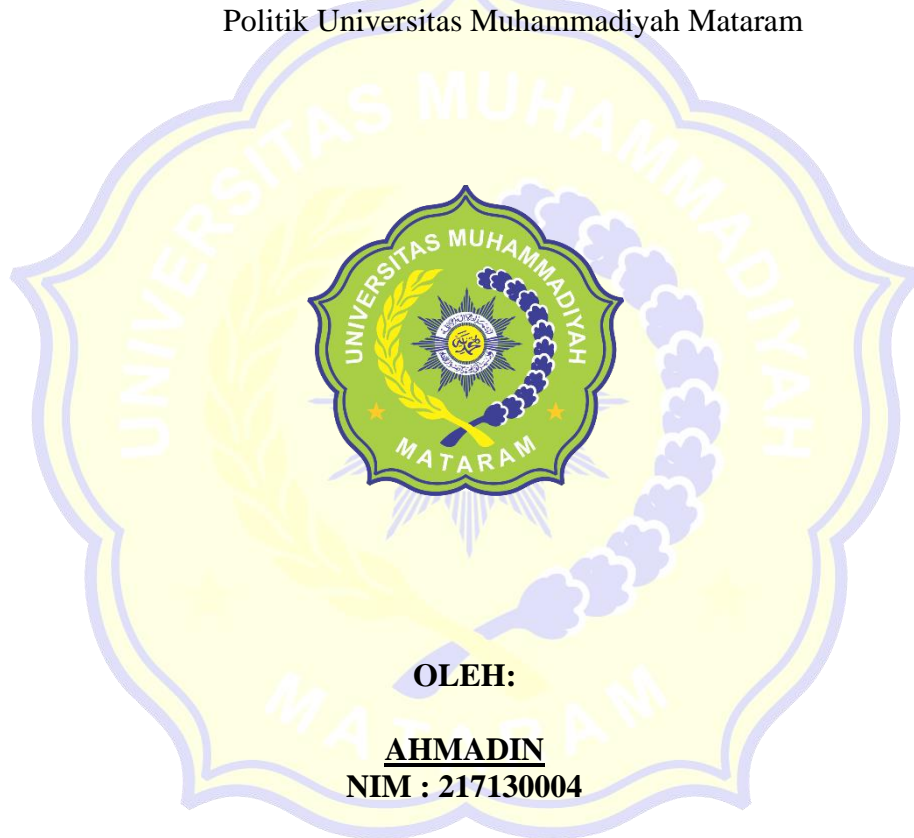


SKRIPSI

**EVALUASI KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DALAM MENJALANKAN FUNGSI DAN PERANNYA
DI ERA OTONOMI DAERAH 2020
(Studi Kasus Desa Oi Bura Kecamatan Tambora Kabupaten Bima)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (S1) Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu
Politik Universitas Muhammadiyah Mataram



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLTIK
UNVERSTAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2022



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jln. K.H. Ahmad Dahlan No.1 Telp. 639180_633723 Mataram

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**“EVALUASI KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM MENJALANKAN FUNGSI DAN PERANNYA
DI ERA OTONOMI DAERAH”
(STUDI KASUS DI DESA OI BURA KEC. TAMBORA KAB. BIMA TAHUN 2020)**

OLEH :

AHMADIN
217130004

Untuk memenuhi ujian skripsi
pada tanggal... 23... Juli 2022

Menyetujui:

Dosen Pembimbing I

Drs. Amil, M.M.
NIDN. 0831126204

Dosen Pembimbing II

Ilham Zatri, S.IP., M.IP.
NIDN. 0817119102

Menyetujui:

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universita Muhammadiyah Mataram



Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan

Agus Hedi, S.IP., M.IP.
NIDN. 0816057902

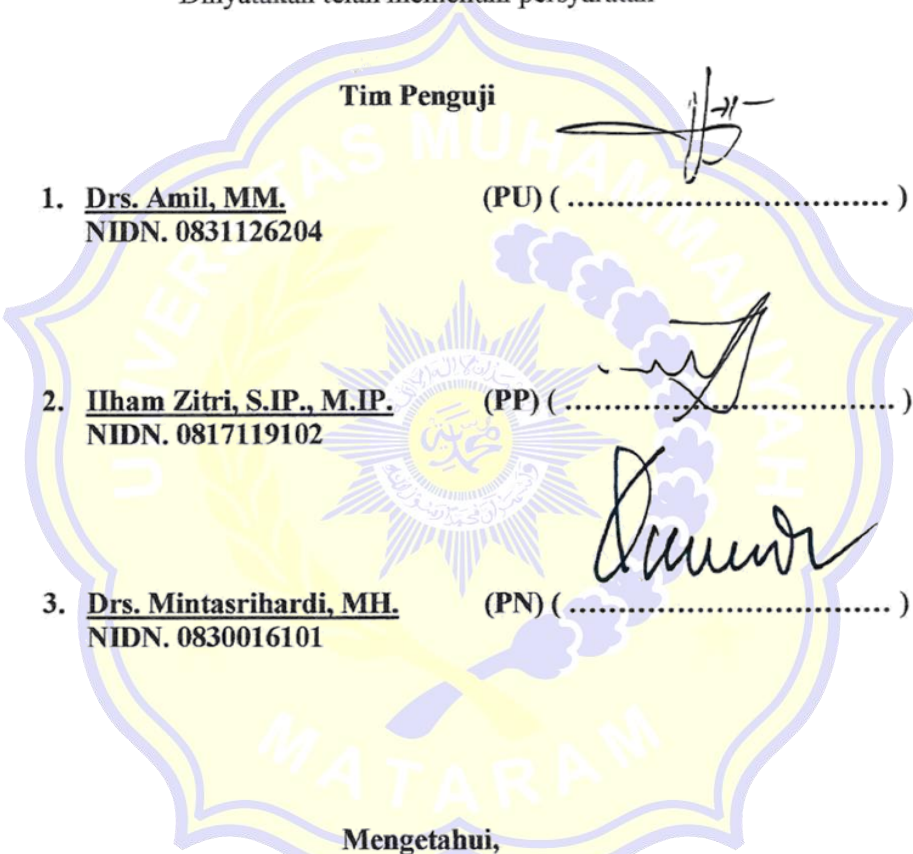
LEMBARAN PENGESAHAN
EVALUASI KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM MENJALANKAN FUNGSI DAN PERANNYA
DI ERA OTONOMI DAERAH TAHUN 2020

Oleh :

AHMADIN
217130004

Telah dipertahankan didepan penguji
Pada tanggal 3 Agustus 2022
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim Penguji

- 
1. Drs. Amil, MM. (PU) (.....)
NIDN. 0831126204
2. Ilham Zitri, S.IP., M.IP. (PP) (.....)
NIDN. 0817119102
3. Drs. Mintasrihardi, MH. (PN) (.....)
NIDN. 0830016101

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



Dr. H. Muhammad Ali, M, Si
NIDN. 0806066801

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AHMADIN
NIM : 217130004
Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN
Fakultas : FISIPOL

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah di anjurkan untuk mendapatkan gelar akademik (SARJANA), Baik ditingkat Universitas Muhammadiyah Mataram maupun di perguruan tinggi lainnya
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana kepada karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Mataram, 23 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan



Ahmadin
Nim. 217130004



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMADIN
NIM : 217130004
Tempat/Tgl Lahir : LAB. KAMANGA, 17-10-1997
Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN
Fakultas : FISIPOL
No. Hp : 082 340 229 979
Email : imaniman1234568@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Dalam Mendalakan Fungsi dan Perannya di Era Otonomi
Daerah (Studi Kasus Desa Di Bura Kecamatan Tambora
Kabupaten Bima)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain.

464

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 13 September 2022

Penulis



AHMADIN
NIM. 217130004

Mengesahui
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .. AHMADIN ..
NIM : .. 217130004 ..
Tempat/Tgl Lahir : .. LAB. KAMANGA, 17-10-1997 ..
Program Studi : .. ILMU PENGELOMPOKAN ..
Fakultas : .. FISIPOL ..
No. Hp/Email : .. imaniman1234568@gmail.com ..
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

..... Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam
..... Mendalakan Fungsi dan Perannya Di Era Otonomi Daerah 2020
..... (Studi Kasus Desa Di Bura Kecamatan Tambora Kabupaten Bima)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 13 September 2022

Penulis



AHMADIN
NIM. 217130004

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO HIDUP

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” – QS Ar Rad 11



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua ku tercinta (Umar Ibrahim), dan Ibunda tersayang (Alwiah) yang telah memberikan dorongan motivasi, semangat, sampai saat ini anakmu alhamdulillah menyelesaikan tugas Karya Ilmiah (Skripsi).
2. Kakak tersayang (Kuswadin), dan Adik ku tersayang (Irfan, Atun Fadillah) beserta keluarga dan orang-orang disekitar saya yang selalu memberikan dukungan motivasi, semangat dan membantu peneliti baik moril maupun materi dalam proses perjalanan akademik peneliti sampai pada penyusunan Karya Ilmiah ini (Skripsi).
3. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang sudah telah memberikan dukungan support penyemangat terhadap peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir dari penulisan Karya Ilmiah (Skripsi).
4. Keluarga besar peguyuban Ikatan Mahasiswa Tambora Mataram (IMTAM) yang telah memberikan dukungan beserta motivator mengajarkan arti dari sebuah himpunan untuk penyemangati dalam menyelesaikan tugas akhir dari penulisan Karya Ilmiah (Skripsi).
5. Keluarga besar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM UMMAT) yang telah mengajarkan arti sebuah pengalamam bserta keilmuan dalam dunia Akademik, pada sampai titik saya bisa menyelesaikan Studi strata S1 dan terimakasih untuk memberikan penyemangat dalam menyelesaikan tugas akhir dari penulisan Karya Ilmiah (Skripsi).
6. Untuk teman, sahabat beserta kerabat.
7. Kepada seluruh Teman-teman se-angkatan 2017 terutama kelas A Ilmu Pemerintahan yang selalu memberikan semangat dan mengisi hari-hari peneliti menjadi menyenangkan semasa perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Mataram.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (Skripsi) dengan judul **“Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Fungsi Dan Perannya Di Era Otonomi Daerah 2020”** Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SWT, Nabi akhirul zaman yang telah membawa manusia dari zaman *Zahiliah*, zaman yang penuh dengan kebidapan menuju zaman yang beradap hingga saat ini. Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan Pada Kampus Universitas Muhammadiyah Mataram.

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam proses penyusunan Skripsi ini. Banyak tantangan dan hambatan yang penulis hadapi dalam merampungi Skripsi. Penulis menyadari bahwa proses penulisan tidak dapat terselesaikan tanpa ada dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses perjalanan Akademik penulis maupun penyusunan Skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyat Abdul Gani, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram yang selalu memberikan masukan dan bimbingan kepada peneliti.
4. Bapak Dr. Amil, M.M. selaku dosen pembimbing I Skripsi yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan Proposal Skripsi ini.
5. Bapak Ilham Zitri, S.IP., M.IP. selaku dosen pembimbing Skripsi ke II yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun

Skripsi dan memberikan ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.

6. Seluruh Bapak Ibu Dosen dan staf di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama peneliti kuliah di kampung tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Kepada kedua Orang Tua yang selalu memberikan Doa dan Motivasi serta Dukungan bagi peneliti sehingga peneliti selalu semangat dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Kepada teman dekat saya Abdul Hamid dan Kaharudin yang selalu mendampingi, menemani dan memberi semangat kepada peneliti dalam menyusun proposal penelitian ini.
9. Rekan-rekan Mahasiswa program Studi Ilmu Pemerintahan dan semua pihak yang telah memberikan dorongan serta motivasi, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah tulus dan ikhlas memberi Doa dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini.

Peneliti menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran, serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menyerap aspirasi masyarakat dan menjaga marwah demokrasi Indonesia dari desa.

Mataram, 11 Oktober 2021

Penulis,

AHMADIN
217130004

**EVALUASI KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM MENJALANKAN FUNGSI DAN PERANNYA
DI ERA OTONOMI DAERAH 2020**

(Studi Kasus Desa Oi Bura Kecamatan Tambora Kabupaten Bima)

ABSTRAK

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Desa terbentuk sebagai wahana pelaksanaan demokrasi di Desa diharapkan menunjukkan peran penting dalam mendukung perwujudan tata penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik melalui pelaksanaan fungsi dan perannya. Badan permusyawaratan desa (BPD) Oi Bura Kecamatan Tambora Kabupaten Bima adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dusun dan di pilih langsung oleh masyarakat desa.

Sebagaimana fungsi dan perannya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi desa, lembaga pengayom adat, lembaga penampung dan penyalur aspirasi masyarakat desa serta lembaga pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa. Namun yang sering di temukan dan di rasakan masyarakat yaitu badan permusyawaratan desa tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya dan banyak aspirasi masyarakat yang tidak tersalurkan dan di anggap sangat mempengaruhi keikutsertaan masyarakat dalam menata dan melaksanakan pembangunan. Adapun jenis penelitian yang terdapat dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang bersumber dari objek yang terdapat pada keadaan di Desa Oi Bura, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima. Dalam penelitian ini seorang peneliti sebagai instrument, yang secara langsung melibatkan dari dalam subjek penelitian sesuai dengan waktu yang ditentukan yaitu penelitian ini dilakukan selama sebulan mulai dari tanggal, 1 Maret - 30 Maret 2022. Badan Permusyawaratan Desa BPD dalam melakukan penyusunan peraturan maupun kebijakan melalui mekanisme yang tercantum dalam Undang-Undang. Penyusunan RKP Desa, RPJMDes, PERDes BPD selalu mengajak masyarakat dalam menyusun. Dalam tahap penyusunan peraturan Desa, hasil musyawarahlah yang akan dijadikan dasar menepapkan peraturan desa. Badan Permusyawaratan Desa BPD berperan memberikan partisipasi langsung terhadap pemerintah desa serta masyarakat setempat dalam melakukan penanganan penyebaran virus Covid-19. Badan Permusyawaratan Desa BPD berperan dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa mulai dari pengawasan Anggaran serta meminta laporan hasil dari program kerja selama melaksanakan tugas sebagai pemerintah desa dan pengukuran pelaksanaan kinerja pemerintah melakukan berbagai macam pengamatan tentang pelaksanaan kegiatan kinerja pemerintah desa. Dari hasil pengujian yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa BPD terhadap pemerintah desa menuai hasil yang baik.

Kata Kunci : Evaluasi Kinerja, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Fungsi dan Perannya Di Era Otonomi Daerah 2020

**PERFORMANCE EVALUATION OF THE VILLAGE CONSULTANCY
BOARD (BPD) IN PERFORMING ITS FUNCTIONS AND ROLES
IN THE ERA OF REGIONAL AUTONOMY, 2020
(Case Study of Oi Bura Village, Tambora District, Bima Regency)**

**BY :
AHMADIN
ID: 217130004**

ABSTRACT

The Village Consultative Body (BPD), one of the components of the village administration, was established as a means of establishing democracy in the community and is anticipated to play a significant role in assisting with the realization of sound village governance through the performance of its duties. Members of the Village Consultative Body (BPD) in Oi Bura, Tambora District, Bima Regency are directly elected by the village community and serve as representatives of the village population based on the representation of the hamlet area. Likewise, the Village Consultative Body's (BPD) function and role as a village legislative institution, a traditional guardian institution, a channel for the ambitions of the village community, and a body overseeing the village government's operation. However, the village's deliberative council frequently finds and feels that it cannot effectively carry out its obligations and functions. Many people's goals are not channelled, and it is thought that this significantly impacts how the community organizes and implements growth. This study's qualitative research was based on actual events that occurred in Oi Bura Village, Tambora District, and Bima Regency. By using the procedures outlined in the Act, the Village Consultative Body of the BPD drafts regulations and policies. According to the period mentioned, a researcher is an instrument directly involved in the research subject in this study. This research will be conducted from March 1 to March 30, 2022. RKP, RPJMDes, and PERDes BPD constantly extend an invitation to the community to get ready. The discourse outcomes will be the foundation for implementing village ordinances during development. The BPD Village Consultative Body offers the village authority and local community direct involvement in managing the Covid-19 virus transmission. The Village Consultative Body of the BPD uses the processes outlined in the Act to create regulations and policies. The community is always invited to get ready by the BPD, RKP, RPJMDes, and PERDes. The deliberation outcomes will be the foundation for enforcing village regulations while writing them. The village government and local communities are directly involved in tackling the Covid-19 virus's spread through the BPD Village Consultative Body.

Keywords: *Performance Evaluation, Village Consultative Body (BPD), Functions and Roles in the 2020 Regional Autonomy Era*



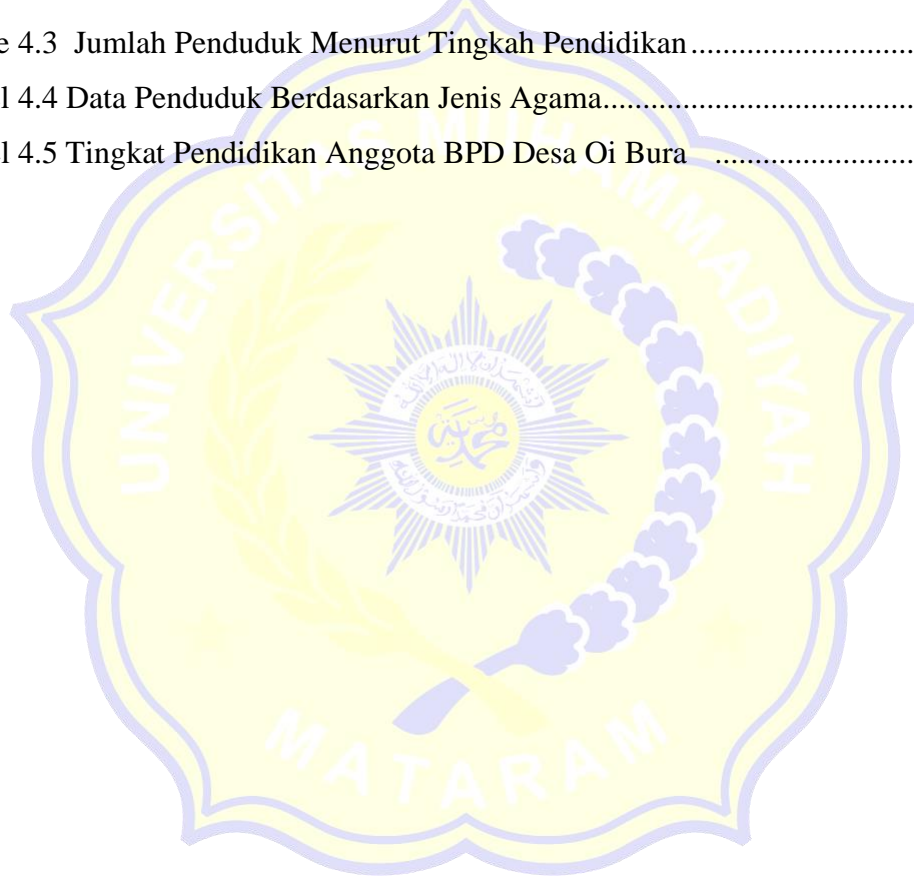
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETTUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Definisi Evaluasi	11
2.3 Definisi Kinerja	12
2.4 Devinisi Ruang Lingkup Good Governance	13
2.5 Definisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	16

2.6 Kerangka Berfikir Penelitian	19
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Metode Penelitian	21
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	25
3.3 Teknik Pemilihan Informan dan Responden	26
3.4 Jenis Data dan Sumber	26
3.5 Teknik Pengumpulan Data	28
3.6 Teknik Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	30
4.2 Hasil Penelitian.....	40
4.3 Peran Aktif Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	49
4.4 Peran Partisipasif Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	60
4.5 Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	64
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	80
5.2 Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	6
Tabel 2.2. Definisi Operasional	21
Tabel 3.1. Daftar Nama Informan.....	25
Tabel 3.2. Daftar Nama Informan.....	26
Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Desa Oi Bura	31
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	32
Table 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	34
Tabel 4.4 Data Penduduk Berdasarkan Jenis Agama.....	35
Tabel 4.5 Tingkat Pendidikan Anggota BPD Desa Oi Bura	54



DAFTAR GAMBAR

Bagan 2.1. Kerangka Berpikir.....	18
Bagan 4.1 STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN Desa Oi Bura Kecamatan Tambora Kabupaten Bima.....	38
Bagan 4.2 Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa oi bura.....	39



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

1. Dokumentasi Penelitian
2. Berita acara
3. Lembar konsultasi skripsi
4. Surat izin penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menggali, menampung mengolah dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa (Alam, 2019: 89).

Menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014; Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa adalah implementasi urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan. Pada dasarnya sebagai realisasi kebutuhan dasar masyarakat, atau sebagai unsur pemerintah yang melayani masyarakat (Zainudin, 2016:338).

Pemerintah desa adalah lembaga eksekutif yang terdiri dari kepala desa dan pejabat desa. Aparat desa bertanggung jawab untuk membantu kinerja kepala desa untuk menjalankan fungsi dan fungsi pemerintah desa.

Aparat desa terdiri dari sekretaris desa dan pejabat desa lainnya. Dengan alat desa, kepala desa para pemimpin pemerintah pemerintah desa memainkan peran penting dalam pengelolaan proses sosial di komunitas desa (Orcomna ddk,2014: 1).

Tugas utama yang harus dilakukan oleh pemerintah desa adalah untuk mengetahui bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi, memberikan layanan sosial yang baik untuk membawa penduduknya ke kehidupan yang makmur, damai dan adil. Pemerintah desa diharuskan untuk lebih memahami apa kebutuhan warganya yang terdiri dari strata yang berbeda. Ini berarti bahwa pemerintah pemerintahnya dan pengembangan kebijakan diperlukan untuk melibatkan semua elemen masyarakat, yaitu sejauh mana, apa kondisi dan apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan dari.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebagai salah satu elemen administrator pemerintah desa, dilatih sebagai sarana untuk implementasi demokrasi di desa, itu adalah untuk menunjukkan peran penting dalam mendukung realisasi desa yang baik Tata kelola melalui implementasi fungsinya dan perannya. Badan permusyawaratan desa (BPD) Oi Bura Kecamatan Tambora Kabupaten Bima ialah lembaga yang menjalankan fungsi pemerintah yang anggotanya adalah perwakilan penduduk desa sesuai dengan perwakilan dusun dan dipilih langsung oleh masyarakat..

Sebagaimana fungsi dan perannya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi desa, lembaga pengayom adat, lembaga

penampung dan penyalur aspirasi masyarakat desa serta lembaga pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa. Namun yang sering di temukan dan di rasakan masyarakat yaitu badan permusyawaratan desa tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya dan banyak aspirasi masyarakat yang tidak tersalurkan dan di anggap sangat mempengaruhi keikutsertaan masyarakat dalam menata dan melaksanakan pembangunan.

Hasil prasarvei tentang pelaksanaan fungsi dan perannya Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Oi Bura Kecamatan Tambora Kabupaten Bima belum melaksanakan fungsinya secara baik sesuai amanat Undang-Undang. Fungsi dan perannya berjalan ketika pada saat penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes), sedangkan fungsi yang lain tidak dijalankan dengan baik. Sehingga masyarakat bingung harus melaporkan kepada siapa, padahal Badan Permasyarakatan Desa adalah lembaga yang berperan penting dalam pembangunan Desa.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul Evaluasi Kinerja Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Fungsi Dan Perannya Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus : Desa Oi Bura Kecamatan Tambora Kabupaten Bima).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka berikut dirumuskan tentang beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi dan perannya dalam penyelenggaraan pemerintah desa, khususnya di desa Oi Bura, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima ?
2. Apa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Oi Bura, Kecamatan Tambora Kabupaten Bima dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui Kinerja BPD dalam menjalankan fungsi dan perannya dalam penyelenggaraan pemerintah desa, khususnya di Desa Oi Bura, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Oi Bura, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

4.1 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak di capai, maka penelitian ini di harapkan mempunyai manfaat untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses pembentukan peraturan desa. Adapun manfaat rencana penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis

- a) penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan ilmu pemerintahan, khususnya pola pemerintahan desa
- b) Menambah cakrawala pengetahuan khususnya mengenai evaluasi kinerja BPD dalam menjalankan fungsi dan perannya di era otonomi daerah di Desa Oi Bura, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima
- c) Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti khususnya terhadap berbagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat terhadap peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam bidang pembangunan desa dengan penyelenggaraan pemerintah yang demokratisasi.

2. Manfaat atau kegunaan Praktis

- a) Manfaat hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Fungsi dan Perannya di Era Otonomi Daerah di Desa Oi Bura, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima.
- b) Manfaat penelitian ini sebagai masukan Pemerintah Kabupaten Bima dalam merumuskan kebijakan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar dapat berfungsi lebih baik dalam mengoptimalkan Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Fungsi dan Perannya di Era Otonomi Daerah Desa Oi Bura, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti n Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Orcomna Musa dkk, 2014	Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Dalam Menjalankan Fungsi Dan Perannya Di Era Otonomi Daerah (Studi Di Desa Mosum Distri Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat)	metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif	Secara umum kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) penyelenggara pemerintahan desa Desa Mosumu Kecamatan Moscona sudah baik oleh pemerhati dalam pelaksanaan fungsinya, namun belum maksimal.
2.	Alamsyah Hamongan Simbolon Dan Walid Mustafa Sembiring, 2015	Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif. Metode Kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis dengan pendekatan inuktif	Hasil penelitian ini penting bagi tugas pokok dan fungsi Dinas Ketertiban Umum untuk mendukung tugas pokok Camat dan Kepala Daerah (Bupati) dalam pelaksanaan dan pelaksanaan program pemerintah daerah di bidang ketertiban umum. itu memainkan peran. Damai di tingkat kabupaten.

3.	Haris Abdul, 2015	Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam otonomi desa	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif	(BPD) memenuhi fungsi dan tugasnya, namun belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang tugas dan fungsi anggota BPD, masalah keuangan BPD dan anggotanya, dan kurangnya keterlibatan di masyarakat karena kurangnya sosialisasi..
4.	Lumemprow dkk, 2021	Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsi (Studi di Desa Kotamenara Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan).	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif.	Mengevaluasi kinerja pemerintah desa dalam memenuhi kewajiban dan fungsi kualitas kerjanya apabila hanya satu program kerja yang ditetapkan secara jelas. Pembagian kerja dan jadwal piket sebagai sarana pengurangan waktu dan manajemen. Semua pekerjaan dibagi secara merata menurut tugas, klien, dan fungsi. Komitmen kelembagaan struktur desa tidak diikuti dengan komitmen pribadi..

5.	Sutikno Bambang, 2015.	Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Selingsing Kecamatan Seluma Utara	Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian “Deskriptif” yang menggunakan pendekatan kualitatif.	Fungsi BPD diukur dari pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan kesejahteraan. Pelaksanaan fungsi legislasi BPD Desa Selingsing Kecamatan Selma Utara dilaksanakan secara ambisius, pelaksanaan fungsi pengawasan dilaksanakan secara tegas, dan fungsi perlindungan adat/adat desa dilaksanakan secara kritis. Pelaksanaan fungsi tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun karena birokrasi pelaksanaan fungsi legislasi masih belum optimal dan BPD Desa Selingsing belum lengkap.
----	------------------------	---	---	--

6.	Andyana Putu Dira dan Inyoman Suprpta 2021.	Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa BPD sebagai lembaga demokrasi desa di desa kalianget seririt kabupaten buleleng.	Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.	Dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat, BPD Desa sebagai lembaga demokrasi desa desa Callianget, yang merupakan sarana demokrasi masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa desa Callianget. menjalankan fungsinya, melaksanakan tugasnya, membahas dan menyepakati dengan kepala desa tentang rancangan peraturan desa, menyerap dan mengkomunikasikan aspirasi masyarakat desa, dan mengawasi kinerja kepala desa Kalianget.
7.	Mangoto Karlos, 2017	Mangoto Karlos (2017). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggara Pemerintah Desa di desa leash Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro.	Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi BPD di Desa Letha Kecamatan Taglandan Kabupaten Kepulauan Citaro belum optimal dan terlihat efektifitas pelaksanaan fungsi BPD. Bentuk kerjasama yang baik antara pemerintah desa dan BPD perlu dikoordinasikan dan ditingkatkan untuk mengatasi permasalahan dan hambatan. Hal ini memungkinkan pembangunan berkelanjutan dan kebaikan bersama untuk maju seperti yang diharapkan.

Sumber: Skripsi dan Jurnal 2014-2021

2.2 Definisi Evaluasi

Evaluasi adalah upaya mengukur secara objektif sumber nilai untuk mencapai hasil yang direncanakan sebelumnya, dan hasil evaluasi dimaksudkan untuk memberikan umpan balik bagi perencanaan masa depan (Yusuf, 2010: 41).

Istilah lain peringkat dapat diartikan sebagai nilai numerik (rating) atau peringkat (Simbolon dkk, (2015: 146).

Penilaian kinerja adalah proses pengukuran kinerja individu, tetapi proses pengukuran selalu membandingkan dengan kriteria, tujuan atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya yang disepakati dengan Uno (2012:12). Konsisten dengan hal tersebut, Wirawan (2012:11) menyatakan bahwa penilaian kinerja adalah proses melakukan penilaian kinerja yang dinilai, dan secara formal mengevaluasi kinerja yang dinilai terhadap perbandingan kriteria kinerja secara teratur, yang diklaim didokumentasikan dan diberitahukan kepada manajemen sumber daya manusia. pendukung keputusan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka di simpulkan bahwa:

1. Evaluasi merupakan penilaian perhadap pekerjaan yang dilakukan sebelumnya sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan pekerjaan selanjutnya.
2. Evalausi adalah proses untuk mengukur kinerja seseorang dimana dalam mencapai tujuan yang ditargetkan.

3. Evaluasi adalah proses untuk melakukan penilaian kinerja seseorang dengan membandingkan standar yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut.

2.3 Definisi Kinerja

Accomplishment adalah terjemahan dari achievement, yang berarti penampilan, pencapaian, atau kesuksesan. Treedin dan Russel (dalam Betti Nasution; 2010:141) menekankan bahwa outcome adalah hasil yang diperoleh setelah pekerjaan atau aktivitas dilakukan selama periode waktu tertentu. Menurut Moeheriono (2012:65), kinerja adalah catatan hasil yang dicapai dari suatu fungsi atau kegiatan selama periode waktu tertentu.

Oleh karena itu, kinerja mengacu pada serangkaian hasil yang dicapai oleh seorang karyawan selama periode waktu tertentu. Pencapaian suatu hasil atau hasil dapat dinilai oleh penulisnya, baik secara individu (individual performance) maupun secara kelompok (group performance). Kinerja individu menggambarkan seberapa baik seseorang menyelesaikan tugas utama untuk memberikan hasil yang ditentukan oleh kelompok atau lembaga. Kinerja kelompok, di sisi lain, menggambarkan sejauh mana kelompok melakukan kegiatan utamanya untuk mencapai hasil yang ditentukan oleh lembaga Benardin dan Russell (dalam Betti Nasution; 2010:141).

Berdasarkan definisi di atas, peneliti dapat memastikan kinerja dari hasil yang diperoleh dengan kerja keras, tujuan dan pendinginan tercapai sesuai, dan prosedur yang digunakan dimungkinkan. . Ini berjalan dengan

benar. Prestasi dapat diartikan sebagai hasil atau hasil kerja dalam kegiatan atau kegiatan atau program yang telah direncanakan sebelumnya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja, antara lain::

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja:

Menurut Haris Abdul, (2015:8), faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu:

a. Masalah Pengetahuan

Dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagai anggota suatu lembaga tentunya memerlukan penggunaan penuh pengetahuan tentang lembaga tempat seseorang bekerja..

b. Masalah Dana/Anggaran

Masalah pendanaan merupakan masalah yang sangat penting dalam setiap kegiatan. Faktor keuangan merupakan salah satu masalah yang harus ditangani oleh suatu organisasi untuk mendukung operasinya dalam mencapai tujuannya.

2.4 Definisi Ruang Lingkup *Good Governance*

1. **Definisi *Good Governance***

Good governance yang dimaksud adalah proses pengelolaan kekuasaan negara untuk melaksanakan penyediaan Publik Good and Service yang disebut Government, sedangkan best practice disebut Good Governance. Untuk melakukan hal tersebut diperlukan komitmen dan

partisipasi semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. (Sedarmayanti, 2013:2).

Di Indonesia *Good governance* sebenarnya sudah dirintis dan dilaksanakan sejak awal era reformasi, ketika sistem pemerintahan dirombak, membutuhkan proses demokrasi yang bersih, maka *good governance* merupakan salah satu alat reformasi yang pasti berlaku bagi pemerintahan baru. Namun melihat kiprah reformasi yang berlangsung selama 15 tahun, sesuai dengan cita-cita reformasi sebelumnya, pelaksanaan *good governance* di Indonesia belum bisa dikatakan berhasil sepenuhnya.

Semangat reformasi melukiskan penyelewengan aparatur negara, dan menyerukan terwujudnya penyelenggaraan negara yang mampu mendukung kelancaran dan kelengkapan pelaksanaan fungsi-fungsi administrasi dan pembangunan pemerintahan negara dengan mengamalkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Selain itu, masyarakat juga meminta pemerintah untuk fokus memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) agar tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu mewujudkan *Publik Good and Service* yang diharapkan masyarakat.

2. **Pinsip-prinsip *Good Governance***

Serdarmayanti, (2012: 2) menjelaskan *good governance* adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan publik good and service disebut *governance* (

pemerintah atau pemerintahan), sedangkan praktik terbaiknya disebut good governance (pemerintahan yang baik).

Prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik (good governance) ada empat elemen atau prinsip utama yang dapat memberikan citra yang ditandai dengan tata kelola yang baik, seperti yang dikatakan oleh Serdamayanti (2012: 5), yaitu tanggung jawab, kewajiban untuk aparatur pemerintah untuk bertindak sebagai orang yang bertanggung jawab dan penjamin itu dari semua tindakan dan kebijakan yang ditentukannya.

Ini memiliki korelasi dari penelitian sebelumnya seperti Tomuka (2013: 9) dengan melihat penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam layanan Publik, ditemukan bahwa faktor-faktor yang mendorong implementasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam layanan publik adalah yang sama Prinsip partisipasi, ketentuan dan aturan berlaku, prinsip transparansi dan prinsip-prinsip reaktif.

Secara umum, layanan Publik yang mempresentasikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik:

- a) Akuntabilitas: Pejabat pemerintah memiliki kewajiban untuk bertindak sebagai individu yang bertanggung jawab atas kebijakan dan kebijakan yang ditetapkannya.
- b) Transparansi: Tata pemerintahan yang baik akan transparan kepada masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah.
- c) Keterbukaan: Kami ingin warga dapat berkomentar dan mengkritik pemerintah yang dianggap tidak transparan.

- d) Aturan Hukum: Tata pemerintahan yang baik ditandai dengan adanya jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat dalam semua kebijakan publik.

2.5 Definisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1. Definisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi untuk mengayomi, adat istiadat, membuat peraturan desa, meyetujui dan menetapkan anggaran desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dipilih melalui proses pemilihan secara demokrasi di desa yakni melalui pemilihan utusan wilayah yang ada didalam desa yang bersangkutan yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah penduduk terbagi dalam beberapa wilayah dan keterwakilan unsur perempuan (Muhamadog dkk, 2020: 26).

(Rozaki dkk, 2020:26) berpendapat bahwa Badan Permusyawaratan Desa BPD merupakan wahana pengartikulasian aspirasi dan partisipasi, lembaga yang menjadi sarana kontrol pemerintah yang efektif. Pandangan Seragi lainnya adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra pemerintah desa dan membawahi kepemimpinan pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra pemerintah desa dan bertanggung jawab menjaga adat istiadat,

menetapkan peraturan desa dengan kepala desa, menyediakan wadah untuk menyerap dan mengkomunikasikan aspirasi masyarakat yang ada, dan mengadvokasi pelaksanaan pemerintahan desa. . Kepala desa harus memperhatikan pengelolaan desa.

Pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota, yang bersama-sama mengucapkan sumpah/janji sebelum menjabat dan dibimbing oleh Bupati/Walikota. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dipilih langsung dari antara anggota BPD dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diadakan secara khusus.

2. **Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

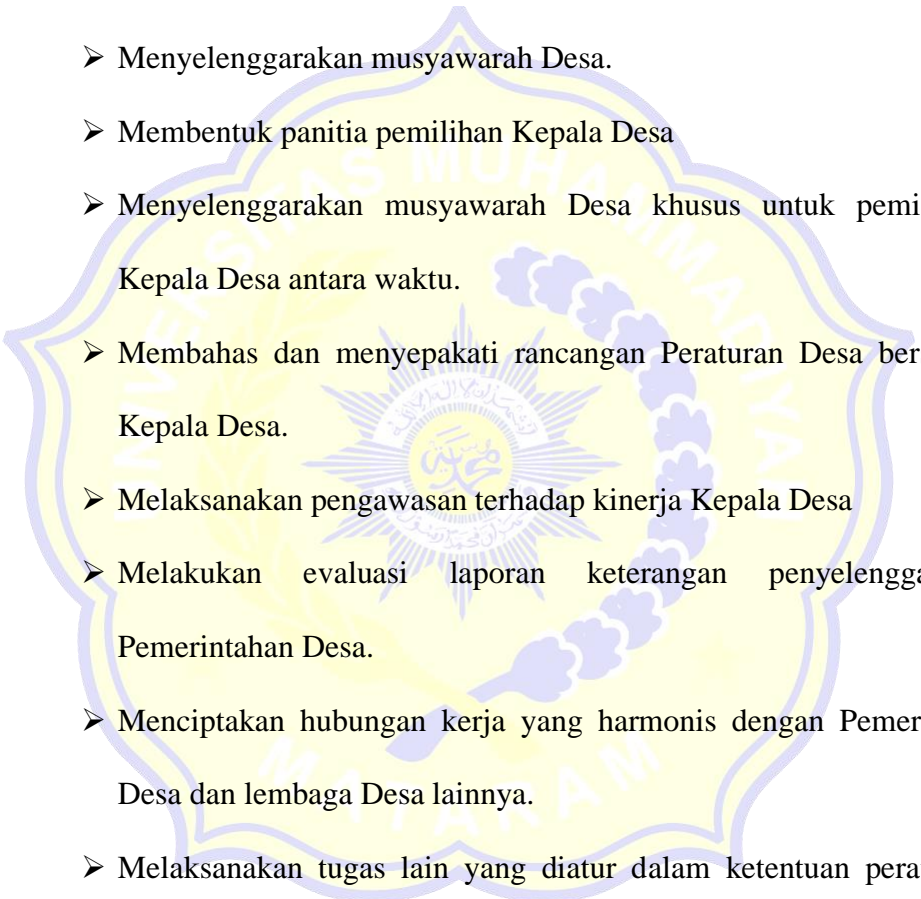
a. Fungsi

Berdasarkan Perda Kabupaten Bima No 1 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa tertera pada pasal 32 menjelaskan fungsi BPD sebagai berikut:

- Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

b. Tugas Dasar Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Terdapat pada pasal 33 pada Perda Kabupaten Bima No 1 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang menjelaskan Tugas-tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seperti dibawah ini:

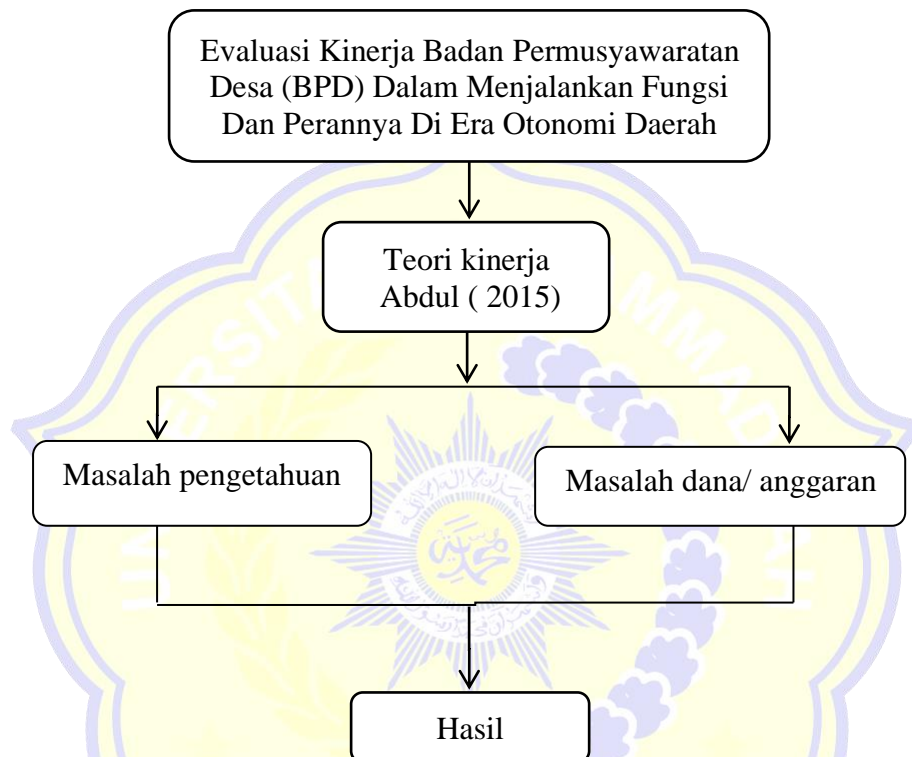
- 
- Menggali aspirasi masyarakat.
 - Menampung aspirasi masyarakat.
 - Mengelola aspirasi masyarakat.
 - Menyalurkan aspirasi masyarakat.
 - Menyelenggarakan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
 - Menyelenggarakan musyawarah Desa.
 - Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
 - Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antara waktu.
 - Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
 - Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
 - Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya.
 - Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.

2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir adalah peta konseptual dari berbagai aspek yang diterapkan dalam proses tata kelola yang menjalankan roda organisasi. Inilah upaya peneliti untuk mendeskripsikan kerangka berfikir yang akan

dicoba diterapkan pada birokrasi pemerintah. Desa Oi Bura berperan sebagai desa yang nantinya akan dituju peneliti untuk mempelajari obyek yang telah ditentukan.

Bagan 2.1.
Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah Oleh Peneliti

2.7 Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah elemen penelitian yang menjelaskan karakteristik masalah yang akan diperiksa. Berdasarkan fondasi teoritis yang dijelaskan di atas, definisi konseptual dari setiap variabel dapat diajukan, sebagai berikut:

1. Definisi *Good Governance*

Tata kelola yang baik (*Good Governance*) merupakan proses penerapan kekuatan Negara dalam realisasi pasokan publik dan layanan publik disebut tata kelola (pemerintah), sementara praktik terbaik disebut "tata kelola yang baik (*Good Governance*). Dengan perannya membutuhkan komitmen dan partisipasi semua pihak, yaitu pemerintah dan masyarakat. Sedarmayanti (2013:2).

2. Pinsip-prinsip *Good Governance*

Sedarmayanti, (2012:5) menjelaskan bahwa *good governance* adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam penyelenggaraan penyediaan barang dan jasa publik, yang disebut *government* atau pemerintahan, dan *best practice* disebut *good governance*.

3. Definisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari tokoh masyarakat desa dan berperan untuk melindungi adat, merumuskan peraturan desa, menyetujui dan menetapkan anggaran desa dengan kepala desa, menyerap dan mengkomunikasikan aspirasi masyarakat, serta penyelenggaraan pemerintahan desa. untuk memantau.

4. Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

a. Fungsi

Berdasarkan Perda Kabupaten Bima No 1 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tertera pada pasal 32 menjelaskan fungsi BPD sebagai berikut:

- Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

b. Tugas Dasar Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Terdapat pada pasal 33 pada Perda Kabupaten Bima No 1 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menjelaskan Tugas- tugas BPD seperti dibawah ini:

- Menggali aspirasi masyarakat.
- Menampung aspirasi masyarakat.
- Mengelola aspirasi masyarakat.
- Menyalurkan aspirasi masyarakat.
- Menyelenggarakan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- Menyelenggarakan musyawarah Desa.
- Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
- Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antara waktu.
- Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa

- Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya.
- Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.

2.8 Definisi Operasional

Variabel operasional adalah devisi yang terkait dengan variabel dengan memberikan makna atau kegiatan yang menentukan, atau memberikan operasiinal yang diperlukan untuk mengukur variabel - variabel ini (Silalahi, 2012: 190). Tabel berikut tentang variabel operasional yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 2.2.
Definisi Operasional

No	Variabel	Indikator	Sub/Keterangan
1.	Evaluasi Kinerja	1.Masalah Pengetahuan	Tentunya dalam menjalankan fungsi dan tugas seorang anggota atau lembaga, diperlukan pengetahuan yang baik tentang lembaga tempat orang tersebut bekerja.
		2.Masalah Dana/Anggaran	Masalah pendanaan merupakan masalah yang sangat penting dalam setiap kegiatan. Faktor keuangan merupakan salah satu permasalahan yang harus dihadapi oleh institusi untuk mendukung operasionalnya dalam mengimplementasikannya.

Sumber: Diolah Oleh 2021

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang terkandung dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dari objek dalam situasi di Desa Oi Bura, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima. Menurut Maykut dan Morehouse di Wowor (2015: 6) Metode penelitian Kuanlitatif adalah pemecahan masalah yang dipelajari dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian seseorang, lembaga, komunitas, dll. sekarang berdasarkan fakta yang muncul.

Penelitian kualitatif merupakan pencarian deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna (perspektif subjek) yang lebih disorot dalam penelitian kualitatif, yayanan teoritis digunakan sebagai panduan sehingga tujuan penelitian sesuai dengan perkebunan. Selain itu, dasar teoretis ini berguna untuk memberikan citra umum dari konteks penelitian dan sebagai bahan untuk diskusi hasil penelitian, pada peneliti kualitatif menyimpang dari data, menggunakan teori yang ada sebagai subjek dan diakhiri dengan teori.

Menurut deskripsi di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan dengan mengamati objek dan menentukan informan, berdasarkan masalah yang terkandung di desa, ini adalah dasar untuk menentukan keberhasilan penelitian dalam membaca dan memahami aspek yang diangkat Tentukan masalah.

3.2 Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu objek yang akan diteliti oleh peneliti, dalam menggali dan mengkaji masalah-masalah, lokasi penelitian ini tempatnya di Desa Oi Bura, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima. Dalam penelitian ini seorang peneliti sebagai instrument, yang secara langsung melibatkan dari dalam subjek penelitian sesuai dengan waktu yang ditentukan yaitu penelitian ini dilakukan selama satu bulan mulai dari tanggal, 1 maret - 30 maret 2022.

3.3 Teknik Pemilihan Informan Dan Respondent

Menurut Sugiyono (2015:38), sumber data penelitian berubah sesuai dengan perkembangan dan tujuan penelitian. Untuk penelitian kualitatif, sampel dan sumber data dipilih untuk menonjolkan perspektif Emik. Hal ini terkait dengan pendapat informan, bagaimana mereka melihat dan memaknai dunia dari sudut pandang mereka. Peneliti tidak bisa memaksa Anda untuk mendapatkan data yang Anda inginkan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengambilan sampel yang tidak mungkin, dan peneliti menggunakan sampling desain dan pengambilan sampel bola salju dalam teknik pengambilan sampelnya. Target sampling adalah teknik yang mengidentifikasi sampel dari sudut pandang tertentu. Misalnya, melakukan penelitian tentang kualitas sumber daya manusia (SDM) dan komunikasi antar organisasi. Contoh sumber data adalah pakar di bidang sumber daya manusia (SDM) dan komunikasi antar organisasi.

Pengambilan sampel bola salju, di sisi lain, adalah teknik di mana sampel ditentukan terlebih dahulu dan kemudian diperluas. Seperti bola salju panjang yang menggelinding tinggi. Pada sampel pertama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dua orang ini belum mengolah data yang diberikan, peneliti lebih berpengetahuan dan memiliki pengetahuan lebih dari dua orang sebelumnya, saya mencari orang lain yang bisa melengkapi data yang diberikan . Kami menambah jumlah sampel (Sugishirono, 2018: 39). Menurut Surakhmad (2009:39), sumber data dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua (dua) yaitu data primer dan data sekunder.

3.2.1 Data Primer

Data primer ialah sumber data utama yang didapatkan oleh peneliti dengan cara melaksanakan observasi secara langsung di lokasi dan lokasi penelitian di Desa Oi Kecamatan Tambora Kabupaten Bima, mengamati tindakan informant dan mewawancarai masyarakat di Kecamatan Tambora. Di bawah ini adalah beberapa respondent yang diharapkan memberikan data yang diperlukan, antara lain

Tabel 3.1.
Daftar Nama Informan

No	INFORMAN	JUMLAH INFORMAN
1.	Kepala Desa Oi Bura	1 Orang
2.	Ketua BPD Desa Oi Bura	1 Orang
3.	Aparatur Pemerintah Desa Oi Bura	5 Orang
4.	Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda Desa Oi Bura	10 Orang
5.	Jumlah	17 Orang

Sumber: Diolah Oleh Penulis

3.3.2 Data Skunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber membaca dan berbagai sumber lain yang terdiri dari dokumen lembaga resmi. Data sekunder juga dapat mengambil bentuk majalah, buletin, lampiran 40 lampiran, hasil survei, penggunaan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan informasi lengkap yang telah dikumpulkan dengan pengamatan dan pemeliharaan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi

3.4.1 Teknik Observasi

Pengamatan Imam Gunawan (2016: 143) adalah teknik pengumpulan data yang prosesnya ditujukan untuk kegiatan pengamatan tertentu, mencatat fenomena yang akan diperiksa. Teknik ini peneliti akan melakukan pengamatan yang mendalam dan secara akurat **terhadap Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Fungsi Dan Perannya Di Era Otonomi Daerah Tahun 2020.**

3.4.2 Teknik Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan pendapat melalui sesi tanya jawab untuk memperoleh informasi baru atau mengembangkan informasi awal. Dalam penelitian ini apabila peneliti tidak menggunakan arahan wawancara maka penggunaan wawancara tidak terstruktur lebih bersifat komplementer, dan wawancara tersebut dilakukan dalam bentuk pertanyaan dua-satu. Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan ditujukan untuk pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dan rinci. Responden yang diminta untuk memberikan data yang dibutuhkan adalah::

Tabel 3.2.
Daftar Nama Informan

No	INFORMAN	JUMLAH INFORMAN
1.	Kepala Desa Oi Bura	1
2.	Ketua BPD Desa Oi Bura	1
3.	Aparatur Pemerintah Desa Oi Bura	5
4.	Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda Desa Oi Bura	10
5.	Jumlah	17

Sumber: Diolah Oleh Peneliti 2021

3.4.3 Teknik Dokumentasi

Dengan menggunakan media modern seperti handphone dan kamera, rekaman orang-orang yang sedang diuji di desa Oi Bura telah

didokumentasikan dengan audio, video dan foto, serta penelitian tambahan yang dilakukan oleh peneliti desa yang akan menjadi bahan referensi untuk. Dokumen ini merupakan catatan peristiwa masa lalu (Sugishirono, 2017: 329). Dokumen dapat berupa tulisan manusia, gambar, atau karya monumental. Dokumen tertulis seperti surat kabar intim, kisah hidup (life story), cerita, biografi, peraturan, politisi. Dokumen lama dapat digunakan untuk pencarian sebagai sumber data kamera yang dapat digunakan untuk pengujian, interpretasi, bahkan prediksi (Moleong, 2016:217)..

4.4 Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2021:7), teknik dan analisis kualitatif meliputi reduksi data, penyajian data, dan pengumpulan data dalam format paralel untuk membangun analisis guna menemukan kesimpulan. Ada tiga aliran kegiatan yang ada selama dan setelah pengumpulan. . Tiga komponen pencitraan, analisis, yaitu:

4.4.1 Reduksi data

PeReduksi data merupakan salah satu teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mengatur, mengklasifikasikan, mengelola, menghilangkan, dan menata data yang tidak perlu sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir. Pengurangan tidak boleh diartikan sebagai kuantifikasi data. Data yang tersedia di lapangan sangat luas dan harus dicatat dengan cermat dan aman. Seperti disebutkan di atas, semakin banyak peneliti memasuki lapangan,

semakin kompleks dan kompleks kumpulan data yang tersedia. Untuk itu, reduksi data harus segera menganalisis data.

Reduksi data berarti merangkum poin-poin utama, memilih poin-poin utama, memfokuskan poin-poin utama, mencari topik dan model. Oleh karena itu, telah diperkecil untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan memfasilitasi pengumpulan dan penyelidikan data tambahan jika diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan perangkat seperti komputer, notebook, dll. Ketika datang ke reduksi data, setiap peneliti dipandu oleh tujuan yang ingin dicapai.

4.4.2 Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan menyiapkan sekumpulan informasi untuk memberikan kesempatan menarik kesimpulan. Format tampilan untuk data kualitatif adalah teks naratif (dalam bentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Penelitian kualitatif dapat menyajikan data dengan menggunakan tabel, grafik, piktogram, dll. Berkat penyajian data, data disusun menjadi model hubungan, terorganisir dan mudah dipahami.

4.4.3 Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Pengambilan kesimpulan merupakan salah satu teknik analisis data kualitatif. Kesimpulan foto merupakan hasil analisis dan dapat digunakan untuk tindakan.

Menurut Miles dan Huberman, kesimpulan ditarik dan diverifikasi. Kesimpulan awal yang ditarik selalu bersifat pendahuluan dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung langkah pengumpulan data selanjutnya. mengumpulkan data. Kesimpulan dari penelitian kualitatif karena itu dapat menjawab rumusan masalah puitis asli, tetapi mereka tidak bisa.

Sebagaimana dikemukakan di atas, masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif selalu bersifat sementara, berkembang setelah peneliti kemudian memasuki lapangan.

